



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)**

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021**

**Jl. Soekarno Hatta No. 62 Kendal Kode Pos 51301 Telp. (0294) 381275/381074 Fax. (0294)
381275e-mail: disnaker@kendalkab.go.id , website : disnaker.kendalkab.go.id**

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan sumber daya manusia dibidang Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut maka tugas pokok dan fungsi tersebut diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Peraturan Bupati Kendal Noomor. 20 Tahun 2018 Tentang pembentukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja padan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Dinas Tenaga Kerja merupakan pelaksana urusan Pemerintah di bidang Tenaga Kerja yang menjadi wewenang daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas mempunyai fungsi:

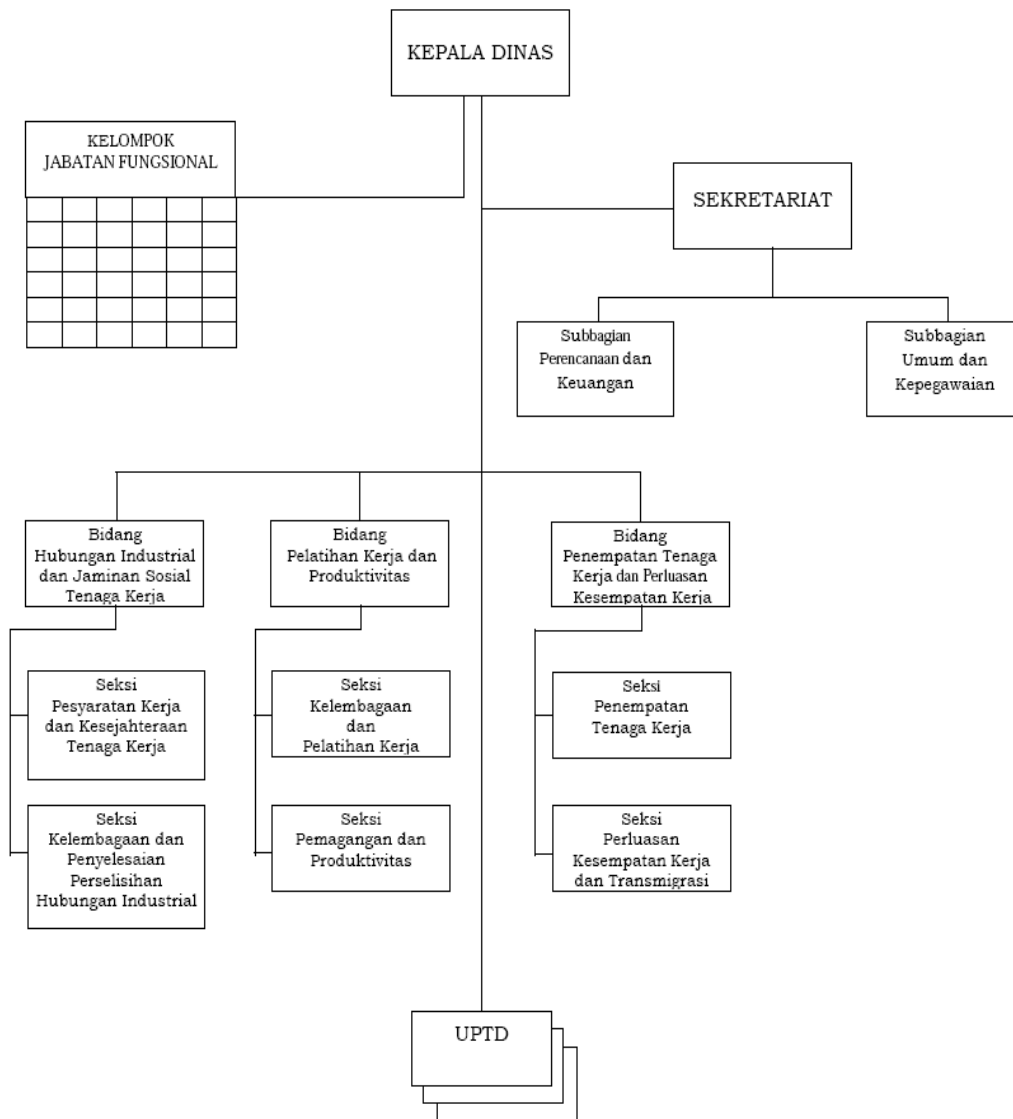
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabuopaten Kendal, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Kerja; dan
 2. Seksi Pemagangan dan Produktivitas;
- e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan

- 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KENDAL



Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal berjumlah 60 orang pada akhir Desember 2022 , dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1.
Jumlah Karyawan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal
Berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
A	Jumlah karyawan / pegawai	61 orang
B	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	
	a. Pejabat Struktural	
	1. Eselon II	0 orang
	2. Eselon III	4 orang
	3. Eselon IV	10 orang
	b. Pejabat Fungsional	13 orang
	c. Staf	13 orang
C	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	
	a. S2	7 orang
	b. S1	25 orang
	c. Sarjana Muda / D3	0 orang
	d. D1	0 orang
	e. SLTA	6 orang
	f. SLTP	1 orang
	g. SD	1 orang
D	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	
	a. IV	6 orang
	b. III	29 orang
	c. II	4 orang
	d. I	1 orang
Catatan : Tenaga Penunjang Kegiatan		16 orang

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kab. Kendal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kendal

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Dinas	1 unit	baik
2	Balai Latihan Kerja	1 unit	baik
3	Kendaraan Roda 4	8 unit	baik
4	Kendaraan Roda 2	27 unit	baik
5	Komputer	17 unit	baik
6	Mesin Faximile	2 unit	baik
7	Laptop	22 unit	baik
8	Handy Cam	1 unit	baik
9	Meja Kursi Tamu	5 Set	baik
10	OHP	1 Set	baik
11	Kursi Lipat	100 buah	baik
12	Kursi Belajar Lipat	90 buah	baik
13	Printer	25 buah	baik
14	Lemari Arsip	25 buah	baik
15	Camera Digital	3 buah	baik
16	Proyektor	3 buah	baik
17	Layar Proyektor	1 buah	baik
18	AC	17 buah	baik

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal

Selanjutnya sebagai salah satu Instansi Pemerintah, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Yang kesemuanya dituangkan dalam sistem akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas secara harfiah didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rumusan birokrasi maka akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat perencanaan strategi dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

Perencanaan kinerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kompetensi Ketrampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	93
		Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	95
		Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75
		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terbina	65
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Baru yang berijin	5
2	Meningkatkan Jumlah Penempatan Kerja, Pelayanan Antar Kerja, Meluasnya akses Informasi Lowongan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pencari Kerja yang ditempatkan	78
3	Menurunnya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Meningkatnya Kesejahteraan	Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB	90

	dan jaminan kepastian hukum bagi pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	23.000
4	Meningkatnya Ketrampilan Calon Transmigran dan Jumlah Transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan Dasar Umum(PDU)	3
		Prosentase Jumlah Transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	20
5	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. kendal	Tingkat Pengangguran terbuka	5.7

2. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

a) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2) PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

- c. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA.

- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
 - 2. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - 1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - 2. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.
- c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
 - 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Kerja.

4) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
 - 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
 - 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

b. Alokasi dana Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output	Outcome
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.354.655.454		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.725.000	5 Dokumen perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	8.000.000	1 Dokemen Perencanaan	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;	12.000.000	1 Dokemen Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	40.725.000	1 Dokemen Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	6.243.697.560		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	6.100.697.560	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;	135.000.000	Terbayarnya honor penatausahaan selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.	8.000.000	1 Dokumen Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.040.394	50 stell	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.040.394	50 stell	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	330.232.500		

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	188 Buah	Terpenuhinya penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	25 jenis	Terpenuhinya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	20.000.000	76 buah	Terpenuhinya penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000	500 orang	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	7.100.000	14 jenis	Terpenuhinya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;	4.000.000	12 bulan	Terpenuhinya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	122.632.500	50 kali	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	100.000.000	1 aplikasi	Terpenuhinya dukungan aplikasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	212.560.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	2 buah	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	192.502.000	1 paket	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	477.400.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	5.000.000	100 lembar	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	276.400.000	12 bulan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

			Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.000.000	7 orang	Terbayarnya gaji tenaga kebersihan dan sopir
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	10.000.000		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	90.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	45.000.000	47 Unit	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;	15.000.000	47 Unit	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	20.000.000	12 Bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	10.000.000	15 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.539.625.000		
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.145.000.000	Peserta Pelatihan 112 orang	Terlaksananya Pelatihan
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.145.000.000	Peserta Pelatihan 112 orang	Terlaksananya Pelatihan
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;	140.000.000	45 Lembaga	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	140.000.000	45 Lembaga	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	254.625.000	96 orang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.	254.625.000	96 orang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	797.350.000		
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.	578.675.000		
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	3.750.000	30 orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	574.925.000	66 orang	Terlaksananya padat karya
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;	85.903.000		
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	8.625.000	40 perusahaan	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.	77.278.000	1 event	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;	218.675.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);	36.250.000	90 orang	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;	156.815.000	2000 orang	Terlaksananya pelayanan pada Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Kerja	25.610.000	16 orang	Terlaksananya Pemberdayaan Purna TKI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	340.155.000		
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	195.130.000		

Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;	177.483.000	60 orang	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	17.647.000	60 perusahaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	145.025.000		
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.850.000	15 kasus	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;	17.075.000	25 orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	119.100.000	20 perusahaan	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH	10.356.710.454		

Sumber Data dapat diambil dari DPA Disnaker Tahun2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja merupakan hal yang penting guna mendorong pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa datang. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Penyusunan LKJIP tahun 2021 bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LKJIP tahun 2021 ini adalah pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Kendal. Akibat kesulitan dalam pengumpulan data kinerja ini, maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlihat kinerjanya, baik kinerja output maupun outcome. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih banyak perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas

mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Karena masih adanya pandemi Covid 19 yang telah melanda Indonesia maka untuk Kabupaten Kendal melaksanakan Recovusing anggaran untuk keperluan penanganan Covid 19. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal telah direcovusing anggaran dari total Rp. **Rp. 10.362.674.954,-** menjadi **Rp. 10.356.710.454,-** .

Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KENDAL
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	CAPAIAN TH SEBELUMNYA	ANALISIS DN EVALUASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kompetensi Ketrampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	93	93	100	91.42	Target telah tercapai 93% pelatihan di UPTD BLK
		Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	95	95	100	94	Target telah tercapai 95 %.
		Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75	75	100	74	Target telah tercapai 75 %.
		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terbina	65	65	100	45	Realisasi lembaga Pelatihan Kerja yang dibina hanya 65
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Baru yang berijin	5	5	100	6	Realisasi LPKS yang berijin baru 5 LPK .
2	Meningkatkan Jumlah Penempatan Kerja, Pelayanan Antar Kerja, Meluasnya akses Informasi Lowongan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pencari Kerja yang ditempatkan	78	78	100	43	Target telah tercapai 78 % karena

3	Menurunnya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Meningkatnya Kesejahteraan dan jaminan kepastian hukum bagi pekerja	Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB	90	90	100	53	Pencapaian 90 % karena untuk menerbitkan Anjuran /Perjanjian Bersama (PB)
		Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	23.000	35.625	154.8	35.625	Peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 35.625 orang.
4	Meningkatnya Ketrampilan Calon Transmigran dan Jumlah Transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan Dasar Umum(PDU)	3	2	66.6	0	Tidak ada pengiriman calon transmigran karena terbatasnya Kuota dari Pemerintah Pusat
		Prosentase Jumlah Transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	20	20	100	0	Target Tercapai 20%
5	Prosentase Tingkat Penggauran Terbuka di Kab. Kendal	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.14	7.55	94.5	7.56	Tidak tercapai karena banyaknya pegawai/ karyawan yang terkena PHK disebabkan pandemic Covid 19

Realisasi APBD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2021 sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.354.655.454	5.425.400.099	1.929.255.355	73.7	98.3		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.725.000	60.632.500	92.500	99	100	5 Dokumen perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	8.000.000	8.000.000	0	100	100	1 Dokemen Perencanaan	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;	12.000.000	12.000.000	0	100	100	1 Dokemen Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	40.725.000	40.632.500	92.500	99	100	1 Dokemen Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	6.243.697.560	4.377.487.230	1.866.210.330	87	97		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	6.100.697.560	4.251.227.203	1.849.470.357	70	100	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;	135.000.000	118.260.000	16.740.000	87	90	Terbayarnya honor penatausahaan selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.	8.000.000	8.000.000	0	100	100	1 Dokumen Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Dinas Sesuai dengan Renja dan Renstra
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.040.394	30.013.500	26.894	99	100	50 stell	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.040.394	30.013.500	26.894	99	100	50 stell	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	330.232.500	321.591.869	8.640.631	89.75	95		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	0	100	100	188 Buah	Terpenuhinya penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	34.284.030	715.970	98	100	25 jenis	Terpenuhinya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	20.000.000	15.103.100	4.896.900	76	80	76 buah	Terpenuhinya penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000	40.570.300	929.700	98	100	500 orang	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;	7.100.000	7.100.000	0	100	100	14 jenis	Terpenuhinya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;	4.000.000	2.010.000	1.990.000	50	80	12 bulan	Terpenuhinya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	122.632.500	120.382.439	2.250.061	98	100	50 kali	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	100.000.000	98.142.000	1.858.000	98	100	1 aplikasi	Terpenuhinya dukungan aplikasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	212.560.000	203.172.500	9.387.500	93	100		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.980.000	20.000	99	100	2 buah	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	192.502.000	183.192.500	9.309.500	87	100	1 paket	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	477.400.000	462.503.000	14.897.000	95.5	98		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	5.000.000	4.420.000	580.000	88	90	100 lembar	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	276.400.000	262.429.002	13.970.998	95	100	12 bulan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.000.000	185.654.000	346.000	99	100	7 orang	Terbayarnya gaji tenaga kebersihan dan sopir
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	10.000.000	10.000.000	0	100	100		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	90.000.000	85.059.150	4.940.850	92.25	98		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	45.000.000	44.989.650	10.350	99	100	47 Unit	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;	15.000.000	10.765.500	4.234.500	72	90	47 Unit	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	20.000.000	19.307.000	693.000	99	100	12 Bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	10.000.000	9.997.000	3.000	99	100	15 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.539.625.000	1.481.400.031	58.224.969	96.2	95		
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.145.000.000	1.111.954.721	33.045.279	96	98	Peserta Pelatihan 112 orang	Terlaksananya Pelatihan
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.145.000.000	1.111.954.721	33.045.279	96	98	Peserta Pelatihan 112 orang	Terlaksananya Pelatihan
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;	140.000.000	134.505.120	5.494.880	95	98	45 Lembaga	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	140.000.000	134.505.120	5.494.880	95	98	45 Lembaga	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	254.625.000	234.940.190	19.684.810	85	90	96 orang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.	254.625.000	234.940.190	19.684.810	85	90	96 orang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	797.350.000	753.184.050	44.165.950	94	96.5		
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.	578.675.000	545.300.950	33.374.050	94	98		
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	3.750.000	3.640.000	110.000	94	100	30 orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	574.925.000	541.660.950	33.264.050	93	95	66 orang	Terlaksananya padat karya
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;	85.903.000	78.792.600	7.110.400	70	90		
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	8.625.000	4.586.600	4.038.400	45	80	40 perusahaan	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.	77.278.000	74.206.000	3.072.000	95	100	1 event	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;	218.675.000	207.863.130	10.811.870	95	95		
Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);	36.250.000	30.423.900	5.826.100	74	90	90 orang	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia

							(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;	156.815.000	152.627.130	4.187.870	96	100	2000 orang	Terlaksananya pelayanan pada Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Kerja	25.610.000	24.812.100	797.900	97	100	16 orang	Terlaksananya Pemberdayaan Purna TKI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	340.155.000	330.398.918	9.756.082	97	98.25		
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.130.000	187.079.818	8.050.182	95.8	96.5		
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;	177.483.000	170.390.418	7.092.582	91	95	60 orang	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	17.647.000	16.689.400	957.600	95	98	60 perusahaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	145.025.000	143.319.100	1.705.900	98.8	100		

Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.850.000	8.448.000	402.000	91,50	100	15 kasus	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;	17.075.000	16.819.100	255.900	98,50	100	25 orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	119.100.000	118.052.000	99,12	99,12	100	20 perusahaan	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH	10.356.710.454	8.304.450.903	2.052.289.551	80	96		

Sumber Data dapat diambil dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ Belanja- fungsional)

Aspek Keuangan yang ditetapkan dibiayai dari APBD Kabupaten Kendal untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2021 adalah sebesar Rp. Rp.10.356.710.454,- terdiri dari :

Belanja Pegawai Rp. 6.232.697.560,-
 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.829.512.894,-
 Belanja Modal Rp. 294.500.000,-

Adapun realisasi APBD Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kab. Kendal secara keseluruhan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2021 Rp	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%		
I	APBDP	10.356.710.454,-	8.304.450.903,-	80	2.052.259.551,-	96

Perlu disampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kab. Kendal dalam Tahun Anggaran 2021 sisa anggaran sebesar Rp. 2.052.259.551,- penyumbang terbanyak dari sisa Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.849.470.357,- ini selain mendapat anggaran dari APBD Kab. Kendal, juga mendapatkan anggaran dari APBN.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran setelah dilaksanakan evaluasi, maka diperoleh nilai capaian untuk APBD Kabupaten Kendal sebesar 96 % untuk realisasi fisik dan 80% untuk keuangannya.

Demikian LKJIP Dinas Tenaga Kerja Kab. Kendal Tahun 2021 ini disusun, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaiannya, semoga dapat menjadi pendorong bagi penyempurnaan penyusunan LKJIP tahun selanjutnya.

Kendal, Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN KENDAL



CICIK SULASTRI S.H., M.A.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 198603 2 001